

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tuti Herawati

Dosen STIE STEMBI – Bandung Business School

Defi Nopianti

Peneliti Junior STIE STEMBI – Bandung Business School

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 27 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Good Governance memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: *Standar Akuntansi Pemerintahan, Good Governance, Kualitas Laporan Keuangan*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *Good Governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. (Irvan Permana: 2011)

Tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat saat ini. Tuntutan masya-

rakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. (Diana Sari: 2012)

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun

dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. (Dita Arfianti: 2011)

Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas SPI.

Data hasil pemeriksaan BPK RI Semester 1 tahun 2013 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan dalam tiga kategori yaitu Opini, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Pada Semester 1 tahun 2013, 415 LKPD Tahun 2012, BPK telah memeriksa 415 LKPD Tahun 2012 dari 529 pemerintah daerah tingkat provinsi/ kabupaten/ kota, termasuk lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Terhadap 415 LKPD Tahun 2012, BPK memberikan opini WTP atas 113 entitas (termasuk 41 entitas dengan opini WTP-DPP), opini WDP atas 267 entitas, opini TW atas 4 entitas, dan opini TMP atas 31 entitas. (IHPS 1 Tahun 2013)

Atas 267 LKPD yang masih memperoleh opini WDP, pada umumnya laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan akun yang dikecualikan, di antaranya aset tetap yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal belum disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai

bersih yang dapat direalisasikan, penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pertanggungjawaban belanja hibah tidak sesuai dengan ketentuan. (IHPS 1 Tahun 2013)

Menurut BPK (2013) Atas 4 LKPD yang memperoleh opini TW pada umumnya laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dalam semua hal yang material, diantaranya pada akun aset tetap, kas, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, serta belanja modal.

Atas 31 LKPD yang memperoleh opini TMP pada umumnya laporan keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang disebabkan oleh pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Menurut BPK (2013) salah satu akun yang sering dikecualikan dalam pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan adalah aset tetap. BPK telah memberikan opini pengecualian atas 236 LKPD yang tidak dapat menyajikan informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun rincian dari permasalahan tersebut antara lain adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 34 kasus yang terjadi di 34 LKPD, dikuasai pihak lain sebanyak 13 kasus yang terjadi di 13 LKPD, belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian sebanyak 33 kasus yang terjadi di 33 LKPD, aset tetap tidak dirinci sebanyak 84 kasus yang terjadi di 84 LKPD, aset tetap tidak didukung catatan/data sebanyak 101 kasus yang terjadi di 101 LKPD, dan penatausahaan aset tetap tidak memadai sebanyak 65 kasus yang terjadi di 65 LKPD, serta permasalahan lain-lain sebanyak 1 kasus yaitu aset tetap belum didukung bukti kepemilikan yang terjadi di 1 LKPD.

Abdul Halim (2012) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan banyak mengalami kesulitan terutama di daerah. Hal ini tampak dari opini audit oleh

BPK terhadap laporan keuangan pemda (pemerintah daerah). Memburuknya opini atas laporan keuangan pemda-pemda menurut Ritonga dalam Abdul Halim (2012) salah satunya disebabkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah itu sendiri.

Menurut Sofian Effendi (2011), ada tiga pilar pokok yang mendukung pencapaian *Good Governance*, yaitu pemerintah, *civil society* (masyarakat madani/ masyarakat sipil) dan pasar (dunia usaha). *Good Governance* akan tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi antara ketiga pilar tersebut memiliki interaksi yang setara dan saling bersinergi. Namun demikian, ada prasyarat agar interaksi demikian dapat terwujud, yaitu adanya kepercayaan publik, transparansi, partisipasi, dan regulasi yang sehat. Salah satu upaya untuk mewujudkan kepercayaan publik adalah dengan meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas yang tercermin diantaranya pada laporan keuangan Pemerintah. Laporan keuangan Pemerintah merupakan komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah.

Permasalahan mengenai laporan keuangan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan kurangnya itikad baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para praktisi akuntansi sektor publik untuk menciptakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sehingga menurunnya kredibilitas pemerintah baik dimata rakyat maupun di mata investor yang diharapkan dapat memajukan perekonomian daerah.

Mengutip pendapat wakil presiden Boediono (2012), yang menyatakan "ketertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan basis dari perbaikan yang disebut dengan istilah *good governance* tidak akan berhasil, jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas. Jadi, laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat *good governance*". Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih

(*clean government*) adalah merupakan tuntutan rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Kota Banjar, Kota Depok, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cimahi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jabar.

Menurut Cornell S. Prawiradiningrat (2014), pemeriksaan atas LKPD TA 2013 dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada BPK bahwa Pemerintah Daerah telah menyajikan secara wajar semua akun di dalam LKPD TA 2013 sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula LHP atas LKPD TA 2013 kepada 12 Pemda lain di Jabar yaitu Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Subang. Dari 12 Pemda tersebut Kabupaten Indramayu mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat atau Disclaimer Opinion, sedangkan sebelas entitas lainnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahria Syafrudin (2011) pada acara "Sawala Pemerintahan Karut-marut Penyusunan Keuangan Daerah" mengungkapkan bahwa opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena BPK mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum memadai dan kurang ditaatinya

ketentuan perundangan. Dari pemeriksaan BPK, banyak temuan berulang dari tahun ke tahun, tanpa ada keterangan bahwa temuan itu sudah ditindak lanjuti oleh pemda. Temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkappannya dalam laporan belum memadai.

Rumusan Masalah

- 1) Seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah di Jawa Barat.
- 2) Seberapa besar pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah di Jawa Barat.
- 3) Seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah di Jawa Barat.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum. Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak di luar organisasi. Para pengguna laporan keuangan di luar organisasi akan dapat memahami Informasi yang disajikan jika disajikan dengan criteria atau persepsi yang dipahami secara sama dengan penyusun laporan keuangan. (Abdul Halim, 2012: 225)

Definisi Standar Akuntansi menurut Sinaga dalam Abdul Halim (2012: 225), yaitu: "Standar akuntansi merupakan aturan utama

yang harus diacu dalam penyajian laporan keuangan dalam kerangka prinsip akuntansi berlaku umum. Standar tersebut penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan."

Deddi Nordiawan (2006 : 23) menyatakan untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintahan yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP.

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan Menurut Abdul Halim (2012: 244), yaitu: "SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) merupakan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sistem pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintah, yang terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian Negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan keuangan."

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 (2010:2) yaitu: "Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah"

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010, 2010 : 9)

Manfaat SAP antara lain adalah meningkatkan keterbandingan (*comparability*) antar laporan keuangan pemerintah. Namun tidak hanya sampai disitu, SAP

berusaha mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara sehingga Indonesia dapat bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. (Abdul Halim, 2012 : 244)

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. (Deddi Nordiawan, 2006:25)

Menurut Nunuy Nur Afiah (2009 : 27) Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 hal, yaitu:

- 1) Pengakuan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Dalam menentukan apakah suatu kejadian atau peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.
- 2) Pengukuran. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- 3) Pengungkapan. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Good Governance

Isu *governance* mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintah maupun di sisi warga. (Hetifah Sj. Sumarto, 2009:1)

Hetifah Sj. Sumarto (2009:1) mendefinisikan *governance* sebagai berikut: "*Governance* di sini diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik."

Kebijakan Asian Development Bank (ADB) mengaktikulasikan empat elemen esensial dari *good governance* yaitu *accountability, participation, predictability, dan transparency*. Hetifah Sj. Sumarto (2009: 2)

UNDP lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance*, yaitu mengikutsertakan semua, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, social dan ekonomi di dasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. (Hetifah Sj. Sumarto, 2009: 3)

Menurut Mardiasmo (2009 : 18) Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai berikut: "*Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi

tumbuhnya aktivitas usaha.”

Mahsun dalam Abdul Halim (2012 : 250) menyatakan ada 3 prinsip utama yang mendasari penerapan *good governance* yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

Sementara itu, UNDP dalam Mardiasmo (2009 : 18) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

- 1) *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- 2) *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- 3) *Transparency*. Transparansi di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- 4) *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *holder*.
- 5) *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang luas.
- 6) *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- 7) *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- 8) *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- 9) *Strategic vision*. Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari delapan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*)

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan output akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan di tingkat PPKD. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. (Nunuy Nur Afiah, 2009: 161)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. (Standar Akuntansi Pemerintah (Kerangka Konseptual Paragraf 18))

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2012:14) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhinya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1) Relevan

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (Kerangka Konseptual Paragraf 36) Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan

keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu. Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (Kerangka Konseptual Paragraf 38) Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Penyajian laporan keuangan tidak bersifat bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (Kerangka Konseptual Paragraf 39) Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (Kerangka Konseptual Paragraf 40) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan, yaitu : "Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia."

Deddi Nordiawan (2009:25) menyatakan bahwa adanya Pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintah pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu: "SAP diterapkan di lingkup pemerintah, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah"

Hal ini di dukung dengan hasil penelitian yang dilakukan Purwaniati dan Imam Subaweh (2008) pada Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dimana pemangku kepentingan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa sebelum penerapan SAP, laporan keuangan yang berupa laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional belum dapat memecahkan permasalahan pencatatan keuangan dan belum ada cara untuk memecahkan permasalahan pencatatan keuangan. Setelah penerapan SAP, Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional telah memuat seluruh informasi keuangan yang terjadi, dapat memecahkan semua permasalahan pencatatan keuangan, dan ada cara untuk memecahkan permasalahan pencatatan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar sebaiknya mengacu pada

Standar Akuntansi Pemerintah. Pemerintah dapat mempublikasikan hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Gede Edy Prasetya (2005)

Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Good Governance adalah pengolahan pemerintahan yang baik. Pemerintah dituntut agar dapat mengelola daerahnya dengan baik, memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran masyarakat. (Deddy Somantri, 2009)

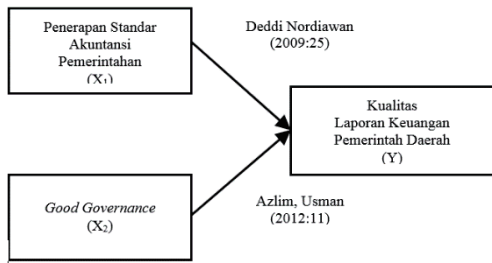
Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan. Pemerintah sebagai pengelola keuangan negara juga harus mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelolanya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Pertanggungjawaban haruslah diungkapkan secara transparan sehingga benar-benar mencerminkan akuntabilitas. Untuk menilai akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintah, maka laporan keuangan pemerintah juga harus diaudit. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh BPK sebagai auditor eksternal. (Desi Handayani, 2012)

Menurut Azlim dan Usman (2012:11) pengaruh antara penerapan *good governance* dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu: "Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas."

Dari hasil penelitiannya Julianet (2013) menyatakan kualitas informasi keuangan sebagai hasil dari penerapan *good governance* perlu memperhatikan ketepatan waktu dalam menyusun laporan keuangan daerah. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang baik dan tepat waktu, maka pemerintah harus melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan periode laporan seperti disajikan sekurang-

kurangnya sekali dalam setahun atau dalam situasi tertentu dapat berubah sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Sehingga kualitas informasi yang dihasilkan lebih akurat serta dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi masa lalu dan memprediksi masa depan.

Dari kerangka penelitian dan hubungan variabel diatas, maka dapat dibuat Paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.



Gambar 1
Model Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

- H₀₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H_{a1} : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H₀₂ : *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H_{a2} : *Good Governance* berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H₀₃ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan

H_{a3} : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Yang menjadi objek penelitian adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan *Good Governance*, dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah di Jawa Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian verifikatif karena mengamati hubungan variabel-variabel tersebut dari hipotesis yang telah dibuat secara sistematis melalui pengujian statistik.

Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian survey, yakni penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Teknik penentuan data dalam penelitian ini menggunakan populasi untuk menentukan obyek atau subyek yang memiliki karakteristik tertentu. Karena penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah di Jawa Barat maka Populasi dalam penelitian ini adalah 27 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh atau yang sering disebut sensus, artinya keseluruhan populasi diambil sebagai objek penelitian. Berhubung data hasil kuesioner merupakan data yang berskala ordinal, maka agar data tersebut dapat diolah dengan menggunakan metode-metode statistik parametik, perlu terlebih dahulu untuk “meningkatkan” skala datanya menjadi skala interval. Adapun salah

satu metode yang digunakan oleh penulis adalah *Metode Succesive Interval* (MSI).

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apakah pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan *Good Governance* (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) baik secara simultan maupun parsial, dengan bantuan *software SPSS Statistic 16.0*. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1

Dari Tabel 1 di atas pengujian menunjukkan persamaan regresi dengan persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.727	1.929		1.414	.173		
X1	.290	.123	.542	2.352	.030	.490	2.041
X2	.144	.153	.216	.937	.361	.490	2.041

a. Dependent Variable: Y

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 2.727 + 0.290X_1 + 0.144X_2 + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dilihat bahwa koefisien regresi (β₁) untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan (β₂) untuk variabel *Good Governance* (X₂) bertanda positif,

artinya variabel tersebut berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) memiliki nilai koefisien regresi (β₁) sebesar 0.290. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) satu satuan nilai akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.290 satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol.

Variabel *Good Governance* (X₂) memiliki nilai koefisien regresi (β₂) sebesar 0.144. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan penerapan *Good Governance* (X₂) satu satuan nilai akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0.144 satuan nilai, dengan asumsi variabel lainnya nol.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan *Good Governance* (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) baik secara simultan maupun parsial, maka akan dilakukan pengujian terhadap garis regresi tersebut melalui hipotesis.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan *Good Governance* (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara Simultan

Setelah asumsi-asumsi klasik linear berganda diperiksa dan dipenuhi maka berikutnya akan diuji Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan *Good Governance* (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ho : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan *Good Governance* (X₂) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara simultan.

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan *Good Governance* (X₂) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara simultan.

Untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh kedua variabel X tersebut secara simultan terhadap variabel Y adalah dengan melakukan pengujian dengan koefisien determinasi (R^2). Dari hasil pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi yaitu sebesar 0.507, nilai *R-Square* pada tabel *Model Summary* berikut ini:

Tabel 2
Model Summary

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.712 ^a	.507	.455	1.41819	2.536

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Ini berarti secara bersama-sama variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dan *Good Governance* (X_2) memberikan pengaruh 50.7% terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Angka 50.7% ini artinya setiap perubahan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 50.7% dipengaruhi oleh perubahan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dan *Good Governance* (X_2). Adapun sisanya sebesar 49.3% disebabkan oleh variabel-variabel lain di luar kedua variabel tersebut.

Untuk mengetahui signifikan tidaknya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dan *Good Governance* (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara keseluruhan, maka uji F dengan uji dua pihak dalam taraf nyata 5% (0.05). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{(n - k - 1)R^2}{k(1 - R^2)}$$

$$F = \frac{(22 - 2 - 1)(0.507)}{2(1 - 0.507)}$$

$$F = \frac{9.633}{0.986} = 9.77$$

Tabel 3
ANOVA

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	39.247	2	19.624	9.757	.001 ^a
	Residual	38.214	19	2.011		
	Total	77.461	21			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil perhitungan yang terlihat pada tabel ANOVA di atas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 19.83. Sedangkan nilai F_{tabel} pada taraf nyata (α) 5% dengan derajat bebas $V1 = k$; $V2 = n - k - 1 = 22 - 2 - 1$ ialah 3.52. Nilai F_{hitung} di atas kemudian dibandingkan dengan $F_{0.05;(19;2)}$.

Tabel 4
Kesimpulan Pengujian Secara Keseluruhan Model Persamaan 1.

Nilai F_{hitung}	Nilai F_{tabel}	Kesimpulan
9.757	3.52	Signifikan

Sumber: Hasil Perhitungan

Dari tabel 4 di atas terlihat bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} sehingga hasil pengujian yang diperoleh adalah berpengaruh secara signifikan. Atau dengan kata lain pengaruh yang terjadi dapat di generalisis terhadap seluruh populasi yakni Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Atau dengan kata lain Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X_1) dan *Good Governance* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara simultan.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan Good Governance (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara Parsial.

Berikutnya akan diuji pengaruh dari masing-masing variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan Good Governance (X₂) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara parsial. Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₀ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan Good Governance (X₂) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara parsial.

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X₁) dan Good Governance (X₂) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) secara parsial.

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis di atas adalah uji-t. Untuk mengetahui pengaruh langsung secara parsial, maka harus dilakukan uji t terlebih dahulu. Langkah pengujiannya sama seperti pada uji F.

Terlebih dahulu harus dicari nilai t_{hitung} dari masing-masing X₁ dan X₂. Setelah itu nilai t_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai t_{tabel}. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel}. Maka hipotesis signifikan, artinya bahwa pengaruh yang terjadi dapat digeneralisir terhadap seluruh populasi yaitu Pemerintah Daerah di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengolahan data sebagaimana terlihat pada tabel *Coefficients*, maka dapat diambil kesimpulan seperti yang tertera dalam tabel t_{hitung} dari masing-masing variabel bebas seperti di bawah ini. Sedangkan nilai t_{tabel} ialah nilai distribusi t-student pada taraf nyata (α) 5% dengan derajat bebas (df) = n-2 = 22-2 = 20. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} sebagai berikut:

Tabel 6
Kesimpulan Pengujian Secara Individual Model Persamaan II

Variabel	t _{hitung}	t _{tabel}	Kesimpulan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₁)	2.352	2.086	Signifikan
Good Governance (X ₂)	0.937	2.086	Tidak Signifikan

Sumber: Pengolahan Data

Dari tabel 6 di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} X₁ lebih besar dari nilai t_{tabel} sehingga hasil pengujian yang diperoleh adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara signifikan. Atau dengan kata lain pengaruh yang terjadi dapat di generalisir terhadap seluruh populasi yakni Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Sedangkan X₂ lebih kecil dari nilai t_{tabel} sehingga hasil pengujian yang diperoleh adalah Good Governance berpengaruh secara tidak signifikan. Atau dengan kata lain pengaruh yang terjadi tidak dapat di generalisir terhadap seluruh populasi yakni Pemerintah Daerah di Jawa Barat.

Implikasi Penelitian

Dalam penelitian ini dapat kita lihat, bahwa hasil dari pengujian hipotesis yang diajukan yakni Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan maupun secara parsial. Hasilnya adalah positif signifikan. Artinya perubahan yang terjadi pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance akan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti terdahulu. dimana didapatkan pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di

Inspektorat Jenderal, pengetahuan pengelola, dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pada tingkat sedang.

Secara umum berdasarkan pembahasan pada penelitian ini didapatkan sebuah kesimpulan yang sama dengan beberapa peneliti sebelumnya dan teori-teori yang menegaskan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 29%. Pada umumnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah di Jawa Barat sudah dilaksanakan dengan baik.
2. *Good Governance* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 14.4%.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 50.7%.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terlihat bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut saran yang diusulkan :

1. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebaiknya

pemerintah daerah lebih memperhatikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga paham terhadap standar dan aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu pemerintah daerah disarankan untuk selalu mencatat dan menyajikan transaksi atau peristiwa lain sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan referensi yang lebih banyak lagi dan lebih memperluas objek penelitian. Selain itu juga disarankan untuk menambah variabel lain di luar variabel yang telah diteliti seperti kualitas sumber daya manusia. Serta menambahkan responden baru agar hasil penelitian bisa lebih mewakili dan hasil dari analisis atau penelitian yang dilakukan dapat digeneralisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2012. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Halim dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Azlim , Darwanis, Usman Abu Bakar. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan*. Jurnal Akuntansi, Volume I, no 1, Agustus 2012.
- Deddi Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Deddi Nordiawan. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Deddy Somantri Yusuf. 2009. *Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung*.

- Desi Handayani. 2012. *Good Governance dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol.5, Desember 2012.
- Diana Sari. 2012. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- Dita Afrianti. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemda*.
- Gede Edy Prasetya. 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Gujarati, Damodar. 1978. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hetifah Sj Sumarto. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Harun Al-Rasyid. 1994. *Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Imam Ghazali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Irvan Permana. 2011. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Survei Pada Dinas Kota Bandung*.
- Julianet Farrah Boekorsjom. 2013. *Pengaruh Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Good Governance dan Implikasinya Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pada BPKAD Provinsi Papua*
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Nunuy Nur Afiah. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan pemerintah Daerah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010
- Purwanti Nugraheni dan Imam Subaweh. 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 13, No. 1, April 2008.
- Riduwan, dkk. 2011. *Cara Mudah Belajar SPSS 17.0 dan Aplikasi Statistik Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, Uma. 2007. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sunjoyo, dkk. 2013. *Aplikasi SPSS untuk SMART Riset*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, Dwi Seftihani Riana. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal STAR, Vol XI, No 1 – 2014.
- Standar Akuntansi Pemerintah
- Umi Narimawati, dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Genesis Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2003
- Laporan BPK. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*. www.bpk.go.id
- Laporan Seminar Nasional Akuntansi Sektor Publik : "Kualitas Terbaik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini WTP) untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) demi Kesejahteraan Rakyat". www.iaiglobal.or.id
- Ddh (Kamis, 29 Mei 2014 10:21 WIB). *Cimahi dan 4 Daerah Lain di Jabar Raih Opini WTP*. <http://jabar.tribunnews.com>
- Rakernas Akuntansi 2011. *Langkah Menuju Perwujudan Good Governance dan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. www.kemenkeu.go.id